

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini beranjak dari pertanyaan mengapa terdapat simbol-simbol militer dalam penyelenggaraan pendidikan dasar/ Diklatsar di sejumlah organisasi pecinta alam, termasuk Mapala X. Simbol-simbol tersebut seolah menjadi penanda (*signifiers*), yang tidak lantas ada dan diterima begitu saja. Untuk membantu menjelaskan fenomena tersebut penulis menggunakan teori interaksionisme simbolik Mead. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi yang dilakukan manusia senantiasa melibatkan simbol-simbol. Mead mengemukakan bahwa simbol-simbol yang ada dalam praktek pendidikan militeristik dapat diamati.

Sejalan dengan pemikiran Mead, simbol militeristik yang terdapat dalam Diklatsar Mapala X dapat dibagi menjadi simbol fisik dan simbolis. Simbol fisik merupakan simbol signifikan yang dapat ditangkap melalui indra penglihatan manusia. Dalam praktik pendidikan Mapala X simbol fisik tersebut meliputi penyeragaman atribut berpakaian, apel, upacara bendera, serta praktik disiplin militer yang terimplimentasi dalam sanksi serta hukuman yang wujudnya dapat dilihat dengan indra penglihatan. Selanjutnya simbol simbolis. Simbol simbolis merupakan praktek militeristik yang tampil dalam bentuk yang lebih rumit, dan tidak kasat mata

seperti tata bahasa dan penanaman nilai-nilai. Dalam Diklatsar Mapala X, simbol militer secara simbolis seperti penerapan nilai-nilai kepatuhan, aturan yang keras dan kaku, kekerasan simbolis, bentuk organisasi yang komando dan sentralistik.

Kembali pada pengertian Mead, bahwa disamping perilaku manusia yang terimplementasi dalam simbol yang terlihat secara manifes, terdapat aspek yang tersembunyi. Aspek tersembunyi juga memiliki andil besar mengapa terjadi praktek pendidikan militeristik di Diklatsar Mapala X. Fenomena pendidikan militeristik di Diklatsar Mapala X, tidak hanya disebabkan oleh pertimbangan pragmatis dalam menentukan model pendidikan. Fenomena ini di sebabkan beberapa faktor yang bersinggungan dengan peristiwa sejarah serta masalah kebangsaan. Pertama, fenomena ini disebabkan oleh penetrasi negara birokratik militer atau nama lain Orde Baru yang militeristik, dan represif. Kedua, model pendidikan militeristik di Mapala X merupakan dampak politik pencitraan militer.

Di organisasi pecinta alam sendiri secara historis memiliki relasi dengan militer. Dalam konteks penelitian penulis pendidikan militeristik dalam Diklatsar merupakan model pendidikan yang diadaptasi melalui organisasi pecinta alam yang militeristik seperti Wanadri dan Mahacita UPI Bandung, aktor yang memuja militerisme seperti SP, serta militer sebagai sebuah institusi. Baik Wanadri, Mahacita dan Mapala X merupakan organisasi yang dilatih oleh Militer (khususnya Kopasus dan TNI AD). Bahkan Wanadri sebagai *roll model* Mapala X serta organisasi penggiat alam bebas lainnya bagaikan saudara sepelatihan dengan Kopasus.

Hal diatas menerangkan bahwa secara historis organisasi pecinta alam (Mapala) atau penggiat alam (Wanadri), khususnya Mapala X telah terjalin hubungan mesra dengan militer sejak Orde baru berkuasa. Orde Baru sebagaimana yang disebutkan sebelumnya merupakan potret pemerintahan militeristik represif. Kondisi pemerintahan dengan dominasi militer yang dianalogikan sebagai negara dalam negara, berusaha mempertahankan status quonya melalui berbagai kebijakan seperti pemberlakuan indoktrinasi di masyarakat sebagai bagian dalam pengamalan nilai-nilai 1945 versi militer. Upaya doktrinasi ini juga merupakan sebuah tindakan yang diambil mengingat hubungan mesra mahasiswa dengan militer pecah di tahun 1970-an. Untuk merekatkan hubungan, militer juga melibatkan organisasi pecinta dan penggiat alam, khususnya Mapala X untuk berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan bersama militer, seperti latihan atau misi *Search and Rescue* (SAR), dan kegiatan pendakian bersama; salah satunya ekspedisi Polygon tahun 1999. Inilah salah satu penyebab terjadinya praktek pendidikan Militeristik di Diklatsar Mapala X.

Ditengah keretakan antara militer dan mahasiswa yang terorganisir dalam gerakan mahasiswa, hubungan mesra antara militer dan Mapala X terasa gamang. Terlebih universitas Mapala X, merupakan universitas yang memiliki gerakan mahasiswa yang cukup militan. Meskipun sejumlah gerakan mahasiswa telah dikkerdikan secara sistemik yakni pemberlakuan NKK/BKK, sistem kuliah SKS, penangkapan sejumlah aktivis mahasiswa yang vocal mengkritisi laju pemerintahan, serta berbagai tragedi kemanusiaan yang terjadi sepanjang pemerintahan. Hal ini tidak serta merta membuat Mapala X mengambil jarak dengan militer. Militer dengan

konsep pendidikannya masih dimaknai sebagai *roll model* terbaik Mapala X. pemaknaan ini, sepanjang riset yang dilakukan penulis merupakan dampak politik pencitraan militer yang dilakukan secara masif sepanjang Orde Baru berkuasa.

Selama tiga puluh dua tahun lamanya, militer sebagai sebuah institusi dan ideologinya telah berhasil membangun citra baik untuk melegitimasi dirinya sendiri maupun kekuasaan yang didukungnya melalui (salah satunya) historiografi yang dikonstruksi secara tunggal dan seragam. Proses konstruksi nalar pikir masyarakat melalui persepsi-persepsi kesejarahan dituangkan melalui berbagai medium; narasi sejarah, film, museum, diorama, monumen serta hari-hari peringatan nasional. Dalam narasi sejarah Indonesia, militer selalu ditampilkan dengan citra positif. Implikasinya, ingatan kolektif masyarakat menjadi terkendalikan oleh nalar militer yang kemudian mempengaruhi tingkah laku sebagian masyarakat, sehingga masyarakat menciptakan bayangan diri sebagai “mirip-mirip” militer. Resimen mahasiswa (Menwa), Satuan Tugas (Satgas) partai politik, Banser, Hansip, upacara bendera, baris-berbaris, Ospek, terutama Mapala X merupakan potret fenomena masyarakat sipil yang militeristik.

Politik pencitraan skala masif ini menyebabkan terjadi unfikasi kesadaran di kalangan sipil terutama Mapala X, dan menciptakan perspektif yang menganggap militer salah satu *roll model* terbaik, serta wajar dan pantas menjadi pemimpin bangsa. Buku pelajaran sejarah serta berbagai narasi kesejarahan yang terimplementasi dalam film, museum, dan sebagainya merupakan bagian inti dari terciptanya pengertian bersama mengenai identitas. Bagi rezim otoritarian, buku teks

sejarah merupakan alat yang berguna untuk melegitimasi ideologi negara dan mekanisme otoritarian. Bagi rezim yang dimiliterisasi seperti Orde Baru, sejumlah teks sejarah merupakan alat melanggengkan status quo.

Kini rezim Orde Baru yang militeristik berganti menjadi negara reformis demokratis, namun beberapa bagian dari yang 'lama' masih terasa melekat pada yang baru. Sebagaimana Mapala X dengan pendidikan militeristiknya masih bertahan hingga kini. Mapala X merupakan salah satu contoh dari sekian banyak Mapala/ organisasi pecinta alam. Mapala X juga merepresentasikan sejumlah Mapala lain yang meyakini bahwa pengadopsian praktik militeristik bertujuan untuk membentuk mentalitas anggota pecinta alam. Mentalitas diperlukan dikarenakan petualangan alam bebas/ otonom syarat membawa seseorang kedalam titik nadir antara hidup dan mati. Oleh karena itu pendidikan yang keras dipersiapkan agar siswa memiliki mental yang lebih keras dari alam. Tekanan yang kuat dilakukan agar siswa kuat, disiplin, peka, tanggap dan sensitif dengan keadaan sekitar, sehingga meskipun anggota mengalami titik terendah dalam hidup dan terlepas dari kenyamanan mereka mampu bertahan. Pendidikan militeristik di Mapala X juga bertujuan untuk pembentukan karakter, seperti; yang memiliki rasa persaudaraan yang kuat, loyalitas terhadap organisasi, rasa cinta pada alam, patriotisme, dan berbagai nilai-nilai lain yang diusung komandan.

Penanaman nilai-nilai tersebut sejalan dengan nilai-nilai 1945 versi militer yang tertuang dalam Seminar Angkatan Darat 1972. Nilai-nilai tersebut disosialisasikan melalui sarana-sarana yang digunakan seperti memoar, film,

museum, monumen dan kurikulum sejarah di sekolah dan militer, media serta kegiatan-kegiatan peringatan. Dalam konteks pendidikan yang dekat dengan Mapala X, penanaman nilai-nilai 1945 versi militer yang dijadikan mata kuliah wajib di jenjang universitas adalah mata kuliah Kewiraan. Selain bertujuan menanamkan semangat nasional, mata kuliah kewiraan juga mengajarkan doktrin-doktrin inti militer. Berbagai usaha militer ini ditujukan pada generasi muda agar mereka menghargai apa yang telah dilakukan oleh Generasi 1945, serta menerima dominasi militer di seluruh sektor kehidupan. Dengan demikian praktik militerisasi dan militerisme yang mewabah dalam kehidupan sosial politik, termasuk pendidikan dapat diterima, bahkan dijadikan roll model seperti halnya di Mapala X.

5.2 Refleksi; Mahasiswa Pecinta Alam Kembali Pada Identitas

Penulis mulai dari sebuah pertanyaan bagaimana jika sebuah proses belajar mengajar menggunakan cara-cara represif, tidak demokratis, dan dilaksanakan satu arah bagaikan sebuah pabrik yang menghasilkan ribuan barang dengan cara-cara seragam? Pertanyaan inilah yang kemudian muncul ketika simbol-simbol militeristik yang dimanifestasikan dapat terurai. Diklatsar Mapala X dengan praktek pendidikan militeristik merupakan sebuah model pendidikan yang bertentangan dengan konsep pendidikan pembebasan Paulo Freire.

Model pendidikan militeristik dengan pola-pola pendidikan sentralistik, komando dan siswa diperlakukan sebagai objek, dan prakteknya cenderung menggunakan cara-cara represif menyebabkan ketertindasan bagi siswa selaku

peserta didik. Ketertindasan struktural inilah yang pada tataran global melahirkan proses kemiskinan, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sebagai akibatnya, terjadi transformasi budaya yang bermakna dekaden, yaitu dari budaya kritis menjadi budaya oportunistis dan pragmatis. Dengan demikian, penjinakan yang dilakukan oleh struktur kekuasaan organisasi Mapala X, melalui cara penyeragaman berpikir dan bertindak, mematikan kesadaran kritis siswa selaku mahasiswa. Implikasinya mereka cenderung bertumpu pada pemikiran pragmatis, hanya mengikuti perintah komando instruktur dan komandan.

Ketertindasan ini diperparah dengan doktrin-doktrin kepatuhan, dan keberuntungan (*survive*). Sehingga meskipun siswa dikondisikan berada di titik nadir/ titik terendah dalam hidup, maka ia harus bertahan. Keberuntungan itu dimaknai oleh Mapala X sebagai pendidikan karakter yang membentuk siswa tidak hanya kuat secara fisik, namun juga memiliki mentalitas yang tangguh serta mampu memunculkan nilai-nilai kebaikan lainnya. Sejalan dengan konsepsi militer bahwa “kekuatan seorang prajurit tidak lahir dari kesenangan, melainkan dari penderitaan panjang yang dihadapinya dengan tekun”.

Dalam Diklatsar Mapala X, siswa tidak hanya ditempa secara fisik dan mental oleh senior. Kondisi medan yang beragam, dan panjangnya waktu pendidikan juga cukup banyak menguras fisik maupun psikis. Ditambah dengan pemberlakuan *move and pressing* yang dikatakan sebagai pendidikan karakter tumpang tindih dengan hukuman, menyumbang pemaknaan bahwa Diklatsar Mapala X merupakan pendidikan Mapala yang terberat di Jakarta. Di tengah kondisi tersebut apakah

kegiatan Diklatsar aman untuk dijalankan? Mengingat siswa dalam kondisi lelah dan lemah, namun harus dituntut untuk selalu *survive*. Mengingat sederet kasus kematian dan kecelakaan terjadi dalam prosesi Diklatsar.

Pendidikan sendiri bagi Bourdieu hanyalah sebuah alat untuk mempertahankan eksistensi kelas dominan. Mapala X pada dasarnya hanya menjalankan proses reproduksi budaya (*cultural reproduction*), sebuah mekanisme pendidikan informal, dalam hubungannya dengan Universitas sebagai pendidikan formal, untuk membantu mengabadikan ketidaksetaraan antargenerasi. Kelas dominan mempertahankan posisinya melalui apa yang disebut Illich- *hidden curriculum*, dalam konteks ini Mapala X memengaruhi sikap dan kebiasaan siswa dengan menggunakan budaya kelas dominan. Kelas dominan memaksakan kelas terdominasi untuk bersikap dan mengikuti budaya kelas dominan sebagaimana yang tertulis dalam perangkat serta aturan Diklatsar. Dalam prosesi Diklatsar Mapala X hampir selalu menerapkan budaya kelas dominan dalam aktivitasnya. Siswa dengan stratifikasi paling bawah mengembangkan cara berbicara dan bertindak yang biasa digunakan kelas dominan atau yang biasa diistilahkan Bourdieu dengan habitus.

Pendidikan sendiri menurut Bourdieu merupakan tempat untuk mensosialisasikan habitus kelas dominan sebagai jenis habitus yang alami dan memosisikan habitus kelas dominan sebagai satu-satunya habitus yang tepat dan paling baik serta memperlakukan setiap siswa seolah-olah mereka memiliki akses yang sama kepada habitus tersebut. Dengan cara ini, habitus kelas dominan ditransformasikan menjadi bentuk modal budaya yang diterima begitu saja, dan

bertindak sebagai alat seleksi yang paling efektif dalam proses-proses reproduksi sebuah masyarakat yang hierarkis. Mereka yang memiliki habitus yang sesuai (dengan habitus kelas dominan) akan menerima keberhasilan, sementara mereka yang tidak mampu menyesuaikan habitusnya, akan mengalami kegagalan. Agar siswa dapat mengalami keberhasilan, maka ia harus melakukan –apa yang disebut- proses borjuasi, meniru habitus kelas dominan. Habitus kelas dominan selalu diposisikan sebagai habitus yang paling baik dan paling sempurna.

Berbicara mengenai habitus, hampir mustahil apabila praktek pendidikan militeristik di Diklatsar Mapala X mengabaikan peran desesif kelas dominan yang lebih besar, yakni negara Orde Baru dengan rezim militeristiknya. Dalam kehidupan sehari-hari, negara adalah sebuah realitas politik yang nyaris diterima sebagai suatu pemberian. Kecenderungan ini terjadi karena negara yang diketahui dan dialami setiap hari itu seakan berada di luar kesadaran manusia. Pada tingkat individual, negara baru dirasakan keberadaannya manakala ia berbenturan dengan kekuasaan. Ada sebuah realitas kekuasaan di luar dirinya, yang berada pada atmosfer publik, namun cukup berpengaruh terhadap kehidupannya sehari-hari. Dari kekuasaan dan legitimasi dalam wacana politik, kenyataan itu dapat di sebut sebagai realitas kekuasaan negara dalam masyarakat. Dengan demikian dalam konteks penelitian penulis, praktek pendidikan militeristik di Mapala X terkait dengan struktur sosial politik serta budaya. Dimana dalam struktur tersebut, budaya kelas dominan yang

direpresentasikan oleh negara Orde Baru yang militeristik, berimplikasi pada terciptanya Diklatsar Mapala X yang militeristik.

Dengan melihat bagaimana cara kerja kelas dominan mengontruksi ideologi yang dipraktekkan oleh militer, dapat terlihat bahwa dominasi kelas dominan telah berubah menjadi sebuah hegemoni. Menurut Gramsci dengan konsep hegemoninya, kekuasaan yang langgeng membutuhkan dua perangkat kerja. Pertama berupa tindakan kekerasan yang bersifat memaksa. Kedua bersifat lunak, atau membujuk. Perangkat kekerasan yang memaksa yakni militer, polisi dan penjara. Sedangkan yang lunak dan emmbujuk dilancarkan dalam prantara kehidupan swasta, seperti dalam kehidupan agama, pendidikan, kesenian, serta keluarga.¹

Menurut Gramsci, perangkat kekerasan yang bersifat memaksa dilaksanakan oleh pranata negara (*state*), dan yang sifatnya lunak/ membujuk dilakukan oleh civil society. Bila kekuasaan hanya dicapai dengan mengandalkan kekuatan memaksa, maka yang tercapai hanyalah “dominasi”. Dengan praktek dominasi maka yang tercipta adalah “stabilitas dan keamanan”. Tidak adanya gejolak atau oposisi dari rakyat dikarenakan kelas penguasa menggunakan cara-cara represif seperti yang membangkang dibungkam, dengan cara diculik, dianiaya, di-“aman”-kan pihak keamanan, diadili, dan dipenjarakan sebagai subversi atau pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM). Keadaan ini merupakan representasi pemerintahan

¹ Ariel Heryanto, *Perlawanan dalam Kepatuhan, Esai-Esai Budaya*, Mizan Media Utama, Bandung, 2000, h.107.

Orde Baru, yang kerap menggunakan koersif sebagai upaya stabilisasi dan status quo pemerintah.

Tindakan represif dengan kekerasan menurut konsep hegemoni merupakan hal yang mutlak dan diperlukan penguasa, namun dominasi semacam itu tidak akan mampu melanggengkan kekuasaan. Oleh sebab itu kekuasaan Orde Baru dan dominasi militer runtuh ketika reformasi 1998. Maka untuk melestarikan kekuasaan, menurut Gramsci, dominasi harus dilengkapi-dan lama-lama digantikan oleh hegemoni. Konsep hegemoni inilah terkandung dalam Mapala X. Fungsi hegemoni adalah mengabsahkan penguasa dan segala ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh kekuasaan tersebut. Bila hegemoni tercapai, penguasa tidak perlu terus menerus menindas karena yang tertindas pasrah pada *status quo*. Mereka terbujuk untuk tidak lagi melihat ketimpangan yang merugikan mereka sendiri sebagai siswa. Atau melihatnya sebagai sesuatu yang wajar, alamiah, bahkan adil dan sesuai dengan kehendak ilahi. Tentu saja, untuk mencapai kekuasaan yang hegemonis (membuat yang tertindas bahagia ditindas) jauh lebih sulit ketimbang sekedar mencapai dominasi (penindasan yang keji). Untuk itu peran doktrinasi yang dilakukan saat Diklatsar memegang peranan kuat untuk melancarkan pengaruh yang hegemonik.

Apapun model pendidikannya, perlu adanya evaluasi dan reformasi dalam sistem pendidikan pecinta alam, khususnya Diklatsar Mapala X. Jika tetap menggunakan model pendidikan militeristik, maka cara-cara yang digunakan harus ditinjau ulang dan memenuhi standar *safety procedure*. Disamping itu pentingnya

penyelenggaraan pendidikan yang membebaskan dengan berbasis kemanusiaan. Sehingga tidak hanya sebatas meminimalisir potensi kecelakaan dan kematian, Penyelenggaraan Diksar juga tidak menjadi momok yang menakutkan dan mematikan sikap kritis siswa selaku mahasiswa.

Pendidikan sendiri merupakan sebuah arena pembebasan. Penetrasinya terletak pada pendidikan dilihat sebagai proses yang memanusiakan. Pendidikan sebagai arena pembebasan manusia diperkenalkan pertama kali oleh Paulo Freire. Dalam tulisannya, Freire menjelaskan; pendidikan harus menjadi arena pembebasan manusia sehingga mengantar orang menemukan dirinya sendiri, untuk kemudian menghadapi realitas sekitarnya dengan kritis dan mengubah dunia secara kreatif.² Paulo Freire mengintrodusir metode pendidikan yang disebut dengan ‘pendidikan dialogis’. Pada metode dialogis unsur dialog sangat penting. Terdapat suatu dinamika dialektik antara pendidik dengan anak didik. Penekanannya adalah dengan menyelenggarakan prosesi Diklatsar yang menyadarkan pendidik dan anak didik agar dapat berani bertindak dan bersikap kritis. Dengan prosesi pendidikan yang membebaskan dan manusiawi, maka Mapala X sebagai akronim dari kata mahasiswa dan pecinta alam, tidak hanya mencintai alam, namun kembali pada identitasnya sebagai mahasiswa yang kritis dan dialogis.

² Freire, 1991:80, dalam http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_iv/10770026-nurul-zainab.ps

